

Info Artikel

Kata Kunci:

Pembiayaan;
Mekanisme Anggaran;
Pendidikan.

Korespondensi Penulis
muhajirahb@gmail.com¹
idrisamiruddin20@gmail.com²
siradjuddin@uin-alaudhin.ac.id³

ISSN (Print)
2599-1523

ISSN (Online)
2797-7536

SISTEM DAN MEKANISME PENGANGGARAN PENDIDIKAN

Muhajirah B^{1✉}, Idris Amiruddin^{2✉}, Siradjuddin^{3✉}

Nobel Playgroup and Kindergarten¹
Mahasiswa Pacasarjana UIN Alauddin Makassar²
Universitas Islam Alauddin, Makassar³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis sistem serta mekanisme penganggaran pendidikan yang ada. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen terkait. Sampel penelitian terdiri dari beberapa sekolah dasar dan menengah di Kota Makassar. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penganggaran pendidikan di Kota Makassar masih belum efektif dan efisien. Banyak anggaran yang tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, mekanisme penganggaran yang ada juga masih kurang transparan dan rentan terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam melakukan perbaikan dan pembenahan sistem penganggaran pendidikan di Kota Makassar.

Langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan antara lain adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran pendidikan, memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta meningkatkan transparansi dalam proses penganggaran. Selain itu, penting juga untuk melibatkan semua stakeholder terkait, termasuk masyarakat dan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan, dalam proses perbaikan ini. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kota Makassar secara signifikan. Selain itu, diperlukan juga langkah-langkah konkret seperti peningkatan kualitas guru dan fasilitas pendidikan, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta pemberian insentif bagi guru dan tenaga pendidik yang berprestasi.

Abstract

The study aims to understand and analyze the existing systems and mechanisms of education funding. The results of the study are expected to contribute to improving the effectiveness and efficiency of the use of education budgets. The research uses qualitative methods by collecting data through in-depth interviews and analysis of related documents. The research sample consists of several primary and secondary schools in the city of Makassar. The data collected is then analyzed using content analysis techniques. The results of the research show that the

education system in Makassar City is still ineffective and efficient. Many budgets are inappropriate targets and do not have a significant impact on improving the quality of education. Furthermore, existing enforcement mechanisms are still less transparent and vulnerable to corruption. Therefore, more serious efforts are needed in improving and rebuilding the education system in the City of Makassar. Among the improvements that need to be made are a thorough evaluation of the allocation of education budgets, strengthening monitoring and accountability mechanisms in the use of budgets and increasing transparency in the enrolment process. Furthermore, it is also important to involve all relevant stakeholders, including the community and competent parties in the field of education, in this improvement process. With such efforts, it is expected to improve the quality of education in the City of Makassar significantly. In addition, concrete measures such as improving the quality of teachers and educational facilities, developing curricula that are relevant to the needs of the world of work, as well as providing incentives for performing teachers.

Keywords: *Financing; Budget Mechanism; Education.*

Copyright (c) 2023 Muhajirah B; Idris Amiruddin; Siradjuddin

PENDAHULUAN

Sistem dan mekanisme penganggaran pendidikan mengacu pada proses dan prosedur yang terlibat dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangan untuk tujuan pendidikan. Ini mencakup perencanaan, alokasi, dan pemanfaatan dana untuk mendukung berbagai aspek pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur, gaji guru, beasiswa siswa, dan program pendidikan. Tujuan dari penganggaran pendidikan adalah untuk memastikan bahwa dana yang memadai tersedia untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan. Ini membutuhkan analisis dan perkiraan pengeluaran yang cermat, serta memantau dan mengevaluasi efektivitas alokasi anggaran. Penganggaran pendidikan juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti administrator sekolah, guru, dan anggota masyarakat, untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif. Selain itu, penting bagi penganggaran pendidikan untuk transparan dan akuntabel, dengan pelaporan dan dokumentasi transaksi keuangan secara berkala untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan sebagaimana dimaksud.

Selain itu, penganggaran pendidikan memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap kebutuhan dan tujuan khusus lembaga pendidikan. Ini termasuk mengidentifikasi bidang-bidang di mana dana tambahan mungkin diperlukan, seperti peningkatan teknologi, pengembangan kurikulum, atau pengembangan profesional untuk guru. Dengan menyelaraskan anggaran dengan prioritas lembaga, para pemimpin pendidikan dapat memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan cara yang mendukung keberhasilan siswa dan meningkatkan lingkungan belajar secara keseluruhan. Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan mencakup semua kegiatan yang terkait dengan perencanaan, penggunaan, dan akuntabilitas dana pendidikan di dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Secara umum, kegiatan utama yang terdapat dalam manajemen pembiayaan pendidikan meliputi: 1) *budgeting* adalah proses mengkoordinasikan semua sumber daya yang tersedia secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 2) tahap implementasi terdiri dari alokasi dana berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 3)

pertanggungjawaban (*auditing*) mengacu pada proses mengevaluasi implementasi suatu program yang telah dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Akuntabilitas adalah proses menunjukkan bahwa apa yang telah diimplementasikan sejalan dengan apa yang direncanakan. Ini mencakup tanggung jawab, penerimaan dana, penyimpanan dan pengeluaran, dan kepatuhan terhadap rencana dengan cara yang proporsional (Henukh, 2019). Anggaran adalah komponen penting yang sangat dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Dengan adanya anggaran, lembaga pendidikan dapat mengelola operasinya, seperti pembayaran gaji guru, pembelian fasilitas dan infrastruktur, dan hal-hal terkait lainnya. Anggaran pendidikan dikelola sebagian besar oleh keuangan sekolah (Suhaimi, 2021).

Selain itu, anggaran pendidikan juga harus mempertimbangkan beragam kebutuhan siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus atau dari masyarakat marjinal. Pengelolaan anggaran membutuhkan pikiran yang kreatif dan dinamis. Hal ini penting karena bagaimana seseorang mengelola pengelolaan anggaran berhubungan dengan masalah anggaran yang sangat penting untuk kegiatan sekolah. Salah satu strategi yang harus dimiliki oleh seorang pengelola anggaran adalah strategi perencanaan, strategi manajemen, dan strategi berpikir (Suhaimi, 2021). Mengalokasikan dana untuk program, sumber daya, dan layanan dukungan inklusif dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang adil. Selain itu, sangat penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, dan siswa, dalam proses penganggaran untuk memastikan transparansi dan menumbuhkan rasa kepemilikan dan kolaborasi. Pada akhirnya, penganggaran pendidikan yang efektif memerlukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan lembaga pendidikan yang terus berkembang. Manajemen keuangan dan pembiayaan institusi pendidikan harus mengikuti beberapa prinsip: hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang ditetapkan oleh peraturan dan kebijakan yang berlaku; terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan institusi; dan transparansi sebagai konsekuensi dari keterbukaan akademik (Arwildayanto et al., 2017).

Budgeting yang tepat dalam pendidikan sangat penting karena memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan hati-hati merencanakan dan mengelola sumber daya keuangan, sekolah dapat memastikan bahwa mereka memiliki dana yang diperlukan untuk memberikan pendidikan berkualitas dan layanan dukungan untuk semua siswa. Selain itu, anggaran membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan bidang yang membutuhkan investasi, seperti pelatihan guru, pengembangan infrastruktur, dan integrasi teknologi. Ini memastikan bahwa lembaga pendidikan dapat mengikuti perubahan tuntutan dari lanskap pendidikan dan menyediakan lingkungan belajar yang menguntungkan bagi semua siswa. Selain itu, manajemen keuangan yang efektif memungkinkan sekolah untuk merencanakan masa depan dan menetapkan tujuan jangka panjang. Dengan mengalokasikan sumber daya dengan hati-hati dan memantau pengeluaran, sekolah dapat memastikan keberlanjutan dan menghindari krisis keuangan. Selain itu, praktik anggaran transparan dapat membangun kepercayaan dan kepercayaan di antara pemangku kepentingan, seperti orang tua, siswa, dan komunitas, karena mereka dapat melihat bagaimana uang mereka

dihabiskan untuk meningkatkan hasil pendidikan. Pada akhirnya, mengelola sumber daya keuangan sangat penting bagi sekolah untuk memenuhi misi mereka untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi dan mempersiapkan siswa untuk sukses di dunia modern.

Selain membiayai dan memantau pengeluaran, sekolah juga harus memprioritaskan investasi dalam sumber daya dan program yang secara langsung berkontribusi pada kesuksesan siswa. Ini termasuk mengalokasikan dana untuk bahan pengajaran berkualitas, infrastruktur teknologi, dan peluang pengembangan profesional untuk pendidik. Dengan mengalokasikan sumber daya secara strategis, sekolah dapat meningkatkan lingkungan belajar dan memberikan siswa dengan alat yang mereka butuhkan untuk berkembang secara akademis dan pribadi. Selain itu, manajemen keuangan juga harus melibatkan perencanaan jangka panjang dan perkiraan untuk memprediksi kebutuhan dan tantangan masa depan. Pendekatan proaktif ini dapat membantu sekolah beradaptasi dengan perubahan tren pendidikan dan memastikan pertumbuhan dan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, manajemen keuangan yang efektif di sekolah harus memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menyimpan catatan transaksi keuangan yang jelas dan akurat, sekolah dapat membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan menunjukkan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi area yang berpotensi menghemat atau area yang membutuhkan dana tambahan. Pada akhirnya, praktik manajemen keuangan yang sehat di sekolah berkontribusi pada kesuksesan dan keberlanjutan keseluruhan lembaga pendidikan. Manajemen anggaran di institusi pendidikan seperti sekolah umumnya mencakup pengumpulan dan penerimaan dana yang sah (dana rutin), SPP, sumbangan komite sekolah, donasi, dan usaha halal lainnya, penggunaan dan pertanggungjawaban kepada pihak terkait yang berwenang. Setelah perencanaan anggaran dan perencanaan, dana ini kemudian digunakan untuk melaksanakan proses pendidikan dan operasional (*throughput*). Pada akhirnya, dana ini dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan bersama dengan hasil usaha (*output*) (Arwildayanto et al., 2017).

Artikel ini membahas pentingnya manajemen keuangan di sekolah dan bagaimana hal itu dapat berkontribusi pada kesuksesan dan keberlanjutan lembaga pendidikan secara keseluruhan yang menekankan kebutuhan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga catatan transaksi keuangan yang jelas dan akurat. Dengan demikian, sekolah dapat membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan menunjukkan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Selain itu, manfaat dari praktik manajemen keuangan yang sehat dalam mengidentifikasi area yang berpotensi menghemat atau area yang membutuhkan pendanaan tambahan. Secara keseluruhan, jelas bahwa memprioritaskan manajemen keuangan di sekolah sangat penting untuk fungsi yang efektif dan kelangsungan hidup jangka panjang mereka. Selain itu, menerapkan praktik manajemen keuangan yang kuat memungkinkan sekolah untuk membuat keputusan yang berpengetahuan tentang alokasi anggaran dan alokasi sumber daya. Pada akhirnya dapat menyebabkan hasil pendidikan yang lebih baik bagi siswa, karena dana diarahkan ke bidang yang akan memiliki dampak terbesar pada pengalaman belajar mereka. Di era

anggaran yang ketat dan sumber daya yang terbatas, sangat penting bagi sekolah untuk memprioritaskan manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai yang dapat mereka berikan kepada siswa dan komunitas mereka

METODOLOGI

Permasalahan dan fokus penelitian ini dideskripsikan melalui pendekatan kualitatif yang terdiri dari langkah-langkah penelitian sosial sehingga memperoleh data deskriptif yang dapat berupa baik gambar maupun kata-kata (Haryani, 2023). Penelitian kualitatif menggunakan kondisi obyek alamiah; peneliti berfungsi sebagai alat utama, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian kualitatif menekankan pentingnya pada generalisasi (Abdussamad, 2021). Penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif tentang perilaku dan kata-kata orang yang diamati. Dalam pendekatan ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data yang mereka kumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mendapatkan jawaban masalah yang jelas dan mendalam. Pendekatan deskriptif kualitatif menganalisis data yang diperoleh yang terdiri dari kata-kata, gambar, atau perilaku dengan memberikan gambaran atau paparan situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Untuk menghindari bias peneliti saat membuat interpretasi, pemaparannya harus objektif.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data menggunakan teknik deskriptif analitik tentang sistem dan mekanisme penganggaran pendidikan. Menurut (Sugiyono, 2020) sumber primer dan sekunder dapat digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan sumber datanya. Sumber primer memberikan data kepada pengumpul data secara langsung, sedangkan sumber sekunder memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung. Sumber data dalam artikel ini meliputi buku, artikel, dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Penganggaran Pendidikan

Menurut Akbar mendefinisikan anggaran sebagai perencanaan keuangan yang mencakup estimasi pemasukan dan pengeluaran pendapatan sekolah dalam waktu tertentu. Pengelolaan dana pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). RKS/RKM merupakan rencana kerja yang memiliki jangka waktu empat tahun yang disusun dan dilaksanakan oleh kepala madrasah, guru, pegawai beserta komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Nasional. Dari RKM selanjutnya akan diturunkan menjadi Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan yang selanjutnya akan diwujudkan ke dalam RAPBM. Pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan. Yang memiliki Tujuan ntuk mewujudkan tertib administrasi dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dasar dari pengelolaan keuangan adalah mencapai efisiensi dan efektivitas (Zahrudin et al., 2019).

Kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan secara bertahap dari tahun ke tahun berikutnya dan berkesinambungan sesuai perencanaan program. Pemerintah memegang peranan penting demi terciptanya situasi dan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan yang termaktub dalam pasal 4, ayat 1 Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 yaitu “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa” (Arifin, 2003).

Menurut Sofyan et al., (2021) mengatakan sumber anggaran pendidikan di Sekolah dibagi menjadi dua bagian yang pertama berasal dari dana pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan dalam bentuk Biaya Operasional Sekolah (BOS), sedangkan sumber dana dari masyarakat merupakan bentuk kepedulian lingkungan sekitar terhadap kemajuan sekolah. Alokasi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di Jawa Tengah cukup signifikan ditentukan oleh kebutuhan biaya pembinaan, biaya manajemen dan indeks pembangunan manusia di tiap kabupaten/kota.

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat (Arifin, 2003). Pembiayaan pendidikan merupakan hubungan saling keterkaitan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang bersifat mikro dan makro pada satuan pendidikan. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda beda ,namun memiliki tujuan akhir sama, yaitu 1) peningkatan potensi SDM yang berkualitas 2) penyediaan komponen-komponen sumber pembiayaan pendidikan 3) penetapan sistem dan mekanisme pengalokasian dana 4) efektifitas dan efisiensi penggunaan dana 5) akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) 6) meminimalkan permasalahan terkait penggunaan pembiayaan pendidikan (Ferdin, 2015).

Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam pengelolaan dana pendidikan adalah (Mulyasa, 2013):

a. Perencanaan Pengelolaan Dana Pendidikan

Perencanaan dalam manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di madrasah. Dalam hal ini Gordon dalam Manajemen berbasis sekolah penyusunan anggaran pendidikan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan *Tradisional an Planning Programming Budgeting System* (PPBS) (Mulyasa, 2013).

Ada dua bagian dalam penganggaran yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Perkiraan dan penggunaan anggaran pendapatan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat direalisasikan, dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran. Lipham dalam Mulyasa (2013) terdapat tiga cara pandang yaitu 1) *comparative approach* penganggaran yang dilakukan dengan membandingkan besarnya penerimaan dan pengeluaran untuk setiap bagian anggaran untuk setiap tahun 2) *the planning programming budgeting evaluation*

penganggaran yang berorientasi pada rencana dan sasaran program secara khusus dan umum. Anggaran ini dianalisis antara dana pelaksanaan dengan rencana berdasarkan analisa anggaran berbasis nol. 3) *functional approach* penganggaran dalam bentuk gabungan unsur anggaran comparative Approach dan *The Planning Programming Budgeting Evaluation*.

b. Proses Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran disusun melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) meliputi (1) sumber pendapatan (2) pengeluaran, misalnya untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber belajar dan alat pelajaran dan honor serta kesejahteraan. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini (Lipham, 1985) mengungkapkan empat fase kegiatan yaitu:

- 1) Merencanakan anggaran, kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisa *Cost-effectiveness*, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.
- 2) Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi dan sasaran program pengajaran serta dirumuskan dengan jelas, melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan yang tersedia.
- 3) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan administrasi, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- 4) Menilai pelaksanaan anggaran, menilai proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.

c. Proses Pengaturan Anggaran

- 1) Penerimaan, bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat.
- 2) Penggunaan.
- 3) Pertanggungjawaban anggaran

Dalam pengelolaan keuangan diperlukan ketelitian dalam mengatur keuangan. Pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan atau sekolah dikelola oleh manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas mengatur jalannya keuangan yang ada di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, seorang manajer keuangan harus memiliki langkah-langkah yang tepat agar apa yang ia kerjakan bisa memberikan kelancaran pada lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain adanya perencanaan, adanya sumber daya manusia yang jujur, loyal, dan berkualitas, dan adanya manajer keuangan yang terbuka, tegas dan transparan dalam setiap tugasnya. Menurut (Masditou, 2017) ada beberapa aspek penting yang harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu konsep penganggaran pendidikan pengklasifikasian kegiatan, penentuan standarisasi, dan penentuan biaya satuan dalam penganggaran pendidikan (Martin, 2014).

Mekanisme Penentuan Alokasi Anggaran Rutin Pendidikan

Pengalokasian adalah suatu rencana penetapan jumlah serta prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Dasar-dasar yang dipakai untuk mengalokasikan dana pada unit pendidikan biasanya menggunakan komponen siswa, guru, serta ruang belajar. Selain itu ada pula pengalokasian dana berdasarkan bobot tujuan-tujuan pendidikan, berdasarkan peningkatan angka partisipasi siswa, serta berdasarkan penggunaan rumus-rumus alokasi keuangan. Pengalokasian dana sekolah dari seluruh dana yang masuk ke sekolah antara lain, dari pemerintah, program BKF, donasi umum, Kemitraan, serta usah Lembaga. Pengalokasian dana pendidikan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan di sekolah dan 8 Standar Nasional (SNP) dengan gambaran sebagai berikut (Mulyono, 2010):

1. Pengembangan sarana prasarana sekolah, terdiri dari a) pemeliharaan dan pengembangan ruangan kantor, ruangan proses belajar mengajar, ruangan lab/praktik, musola, ruang OSIS dan UKS, kamar mandi, dan sarana pendukungnya b) ATK c) sarana praktik sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
2. Pengembangan standar pengelolaan. Terdiri dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Administrasi sekolah
3. Pengembangan standar pembiayaan, yaitu: a) beasiswa penuh bagi seluruh peserta didik, b) pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pembiayaan penuh dari dana BOS, c) Uji Kompetensi (Ujikom), d) honor guru 100% dari BPMU + 50% dari BPMU melalui dana bos, e) Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Ulangan Akhir Semester (UAS).
4. Pengembangan standar kompetensi lulusan meliputi: a) sertifikasi kompetensi lulusan yang diselenggarakan sekolah dengan DUDIKA, b) lulusan memiliki sertifikasi kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
5. Pengembangan standar isi ialah pengambilan nilai siswa/peserta didik dan kerjasama dan dukungan dengan DUDIKA.
6. Pengembangan standar proses, meliputi pembelajaran di luar kelas dengan kerjasama dengan rumah-rumah dan penyelenggaraan unit produksi atau *cost business*.
7. Pengembangan standar penilaian pendidikan dengan pengembangan perangkat pendukung penilaian menyesuaikan dengan aspen dan prosedur.
8. Standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan melaksanakan program pembinaan sumber daya manusia.

Mekanisme Penentuan Alokasi Anggaran Pembangunan Pendidikan

Mekanisme penentuan alokasi anggaran pembangunan dilakukan apabila rancangan anggaran sudah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan telah diterima oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jika rancangan anggaran sudah ada di Kemdikbud, maka Sekretariat Jenderal Kemdikbud sebagai koordinator selanjutnya mengirimkan rancangan anggaran tersebut kepada unit utama, dan unit utama selanjutnya membuat alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebijakan pimpinan unit kerjanya, juga didasarkan kepada prioritas yang

diutamakan serta memperhitungkan sasaran yang belum tercapai pada tahun yang sedang berjalan.

Rancangan anggaran akan dijadikan dasar oleh unit utama untuk menganalisis anggaran per proyek dan per kegiatan, serta menyusunnya menjadi rancangan dan rincian biaya yang akan disampaikan kepada Bappenas dan Ditjen Anggaran setelah disahkan oleh Mendikbud sebagai rancangan alokasi APBN Kemdikbud. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun suatu proyek adalah berkaitan dengan karakteristik proyek yaitu dengan proyek lanjutan, proyek baru, bagian proyek, dan tolok ukur. Dalam proyek lanjutan, ketika menentukan rencana-rencana kegiatan yang akan diusulkan harus memerhatikan sasaran yang telah tercapai pada tahun-tahun sebelumnya dan yang telah dilaksanakan pada tahun yang sedang berjalan. Pada proyek baru, proyek yang telah disetujui pada waktu pembahasan DIP dan LK harus sudah menjadi rencana yang matang dilengkapi dengan data hasil studi kelayakan dan disertai jadwal pelaksanaannya yang jelas. Proyek baru biasanya memerlukan kerangka acuan yang dituangkan ke dalam *Term of Reference* (TOR) yang berisi latar belakang, tujuan, kegiatan, sasaran, biaya, dan jangka waktunya (Matin, 2014).

Bagian proyek adalah merupakan bagian dari berbagai kegiatan yang bersama-sama menunjang usaha mencapai sasaran dan tujuan proyek yang bersangkutan. Bagian proyek yang satu dapat dibedakan dari bagian proyek yang lain berdasarkan lokasi dan perbedaan fungsinya. Misalnya karena proyek tersebut memiliki sejumlah aktivitas kompleks yang harus dibagi bagi pengerjaannya maka dibentuk beberapa bagian proyek yang dapat dilaksanakan secara terpisah menurut lokasi maupun menurut karakteristik pekerjaan. Dapat pula dikatakan bahwa bagian proyek di suatu lokasi dan bagian proyek di lokasi lainnya dapat melaksanakan kegiatan sendiri-sendiri karena tidak memiliki kaitan dalam pelaksanaannya baik teknis maupun fungsional. Sementara itu, jika bagian proyek itu saling memiliki kaitan secara fungsional maka bagian proyek yang satu dengan bagian proyek yang lain saling terkait dan konsisten mencapai sasaran proyek yang bersangkutan.

Tolak ukur merupakan patokan yang digunakan untuk menilai tercapai tidaknya suatu target atau sasaran tertentu. Tolak ukur proyek harus memberikan gambaran kuantitatif mengenai kegiatan fisik yang dinyatakan dengan ukuran tertentu, misalnya volume atas sasaran yang akan dicapai (Matin, 2014).

Mekanisme Alokasi Anggaran SPP/DPP

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah sumbangan yang dikenakan kepada wajib bayar untuk digunakan bagi keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan. Dana Penunjang Pendidikan (DPP) adalah dana yang disediakan dalam APBN yang secara nasional jumlahnya sama dengan penerimaan SPP untuk suatu tahun ajaran tertentu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan dan penggunaan SPP/DPP diatur oleh Keputusan Bersama antara Mendikbud dengan Menteri Keuangan. Penggunaan DPP dilaksanakan melalui anggaran rutin Kemdikbud pada setiap tahun anggaran yang dialokasikan dalam DIK Sekretariat Jenderal.

Mekanisme alokasi anggaran SPP/DPP dikategorikan ke dalam dua bagian yaitu mekanisme penyetoran dan mekanisme pelaporan. Mekanisme penyetoran SPP adalah sebagai berikut (Matin, 2014).

- a. Dibuka rekening Mendikbud c.q rekening Penampungan Penerimaan SPP pada Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- b. Bendaharawan penerima SPP menyetor kepada cabang BRI terdekat dalam provinsi yang bersangkutan untuk rekening Mendikbud.
- c. Untuk sekolah menengah yang letaknya jauh dari Kantor Cabang BRI, bendaharawan penerima SPP dapat menyetorkan melalui BRI Unit Desa setempat atau dengan cara mengirimkan pos wesel ke Cabang BRI terdekat.
- d. Penyetoran SPP dilakukan oleh bendaharawan penerima SPP selambat-lambatnya tanggal 15 bulan yang bersangkutan
- e. Pada setiap akhir bulan. Cabang BRI memindahkan penerimaan setoran penerimaan SPP ke BRI Pusat.
- f. Pada setiap tanggal 10 setiap bulannya, BRI Pusat secara otomatis memindahkan seluruh saldo rekening Mendikbud ke rekening Penampungan Penerimaan SPP ke rekening Kas Negara pada Bank Indonesia.

Sementara itu, mekanisme pelaporan SPP adalah sebagai berikut.

- a. Setelah SPP yang diterima di setor ke Cabang BRI atau Kantor Pos, kepala sekolah mengirimkan tindasan bukti setor SPP dan salinan resi pos wesel kepada kantor wilayah.
- b. Setiap tanggal 15 bulan berikutnya, Kepala Kanwil menyampaikan laporan penerimaan SPP kepada Mendikbud kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada dirjen terkait dan kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran.
- c. Pada setiap akhir bulan pertama dari satu triwulan, Sekretaris Jenderal memberitahukan penerimaan SPP triwulan sebelumnya kepada Direktur Moneter Dalam Negeri.
- d. Cabang BRI melaporkan penerimaan SPP tiap bulan kepada Kanwil Depdikbud dan Kanwil Ditjen Anggaran pada setiap tanggal 1 bulan berikutnya.
- e. BRI Pusat menyampaikan laporan tiap bulan kepada Sekretaris Jenderal Kemdikbud dan Dirjen Anggaran dan Moneter Dalam Negeri setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- f. Pada setiap akhir bulan pertama dari triwulan, Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan triwulan sebelumnya tentang data penerimaan dan penyetoran SPP kepada Kanwil dengan tembusan kepada Kanwil Ditjen Anggaran.
- g. Setiap akhir bulan kedua dari suatu triwulan, Kakanwil menyampaikan laporan triwulan sebelumnya secara menyeluruh kepada Sesjen dengan tembusan kepada Dirjen terkait dan Kanwil Ditjen Anggaran.
- h. Atas dasar laporan setiap bulan ketiga dari suatu triwulan, Sekretaris Jenderal Kemdikbud memberitahukan penerimaan dan penyetoran SPP triwulan sebelumnya secara menyeluruh kepada Dirjen Anggaran dan Moneter Dalam Negeri.

Mekanisme Alokasi Anggaran Sumbangan BP3/PMOG

Mekanisme alokasi anggaran sumbangan BP3/PMOG diatur berdasarkan Instruksi Bersama Mendikbud dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8/K/1976 dan Nomor

PUOD.6/I/18, serta Keputusan Mendikbud tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 khususnya butir 2.6 mengenai keikutsertaan masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Dalam pelaksanaan alokasi anggaran sumbangan BP3/PMOG, kantor wilayah dan unit kerja terkait dalam memberikan petunjuk pelaksanaan tata cara penunjukan dan pengelolaannya. Adapun contoh alokasi anggaran sumbangan BP3/PMOG dapat dijelaskan sebagai berikut (Matin, 2014):

1. Taman kanak-kanak dan sekolah dasar:
 - a. 80% untuk kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
 - b. 10% untuk kegiatan pembelajaran
 - c. 7,5% untuk kas BP3/PMOG
 - d. 2,5% untuk iuran Tim Koordinasi
2. Sekolah menengah tingkat pertama dan sekolah menengah tingkat atas:
 - a. 70% untuk kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
 - b. 15% untuk kegiatan pembelajaran
 - c. 10% untuk kas BP3/PMOG
 - d. 5% untuk iuran Tim Koordinasi
3. Seluruh dana yang masuk melalui sumbangan anggota baru, sumbangan tidak mengikat dari masyarakat, dan usaha lain yang sah digunakan untuk:
 - a. 20% untuk kesejahteraan pegawai
 - b. 80% untuk pemeliharaan sekolah

Prosedur Perencanaan Anggaran Tingkat Satuan Pendidikan dan pada Tingkat Wilayah

1. Prosedur Perencanaan Anggaran Pendidikan Tingkat Sekolah

Sekolah sebagai unit kerja yang bertugas mengelola keuangan yang diperolehnya dari berbagai sumber serta memiliki kewenangan dalam penggunaannya untuk berbagai kebutuhan seperti untuk membiayai proses belajar mengajar, melengkapi sarana sekolah, meningkatkan kesejahteraan pegawai sekolah, dan lain sebagainya, maka sekolah harus mempunyai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). RAPBS memuat jenis dan besarnya pendapatan serta jenis dan besarnya pengeluaran. Besarnya pengeluaran sekolah harus berlandaskan kepada besarnya pendapatan yaitu pengeluaran tidak boleh lebih besar dari penerimaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 Ayat 1 menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 juga menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Dana pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dapat bersumber dari usaha-usaha negara lainnya, termasuk dari divestasi saham pada perusahaan negara (BUMN) Bantuan dalam bentuk hibah (grant) dan pinjaman luar negeri (loan) baik dari lembaga-lembaga keuangan internasional (seperti Bank Dunia, ADB, IMF, IDB, JICA) maupun pemerintah baik melalui kerjasama multilateral maupun bilateral (Wandra & Hadiyanto, 2021).

Sumber pendapatan dan penerimaan sekolah dapat berasal dari pemerintah masyarakat organisasi dan perorangan. Anggaran yang berasal dari pemerintah diterima melalui kegiatan rutin dan proyek-proyek pembangunan. Anggaran dari

masyarakat diterima berupa SPP atau DPP, sumbangan BP3/PMOG, dan sumbangan sukarela lainnya. Meskipun ada berbagai sumber penerimaan keuangan sekolah lainnya namun sampai saat ini penerimaan sekolah dari pemerintah masih merupakan sumber yang utama dan terbesar (Matin, 2014). Pengeluaran anggaran pendidikan untuk sekolah pada dasarnya sudah diatur dalam berbagai jenis pengeluaran yang baku. Pengeluaran rutin meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dan subsidi. Pengeluaran pembangunan meliputi: gaji, pengadaan tanah, pengadaan bahan, peralatan dan mesin, perjalanan, konstruksi, dan lain-lain seperti transport lokal, fiskal, dan kerja lembur. Pengeluaran-pengeluaran ini ketika menyusun RAPBS harus diperhitungkan.

Meskipun jenis pengeluaran dan mata anggaran sudah menunjukkan kegiatan operasional namun masih perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang lebih khusus dengan sasaran yang dapat diukur. Berikut ini merupakan bentuk kegiatan yang tercantum dalam buku SKB Mendikbud dan menteri keuangan nomor 0585/K/1987 dan nomor 590/KMK. 03/1987 tentang peraturan SPP dan DPP sekolah menengah, yaitu: pelaksanaan pembelajaran, pengadaan prasarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan pembelajaran, penyelenggaraan EBTA atau EBTANAS dan pengiriman STTB atau NEM, perjalanan dinas supervisi, pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pendataan (Matin, 2014). Agar kegiatan tersebut dapat diukur maka diperlukan satuan unit yang harus diikuti dengan biaya satuannya misalnya biaya satuan siswa, biaya satuan orang/bulan orang/hari, kelompok belajar, hektar, meter persegi dan lain-lain. Penentuan besarnya biaya satuan pendidikan tidak semudah menentukan biaya satuan suatu barang. Berbagai komponen dapat digunakan dalam menentukan biaya pendidikan. Biaya satuan yang ideal adalah satuan yang dapat memenuhi kebutuhan. Dalam penyusunan RAPBS semua aspek keuangan beserta mekanisme penerimaan dan pengeluaran serta harga satuan setiap komponen kegiatan harus diperhitungkan. Kegiatan RAPBS dimulai dengan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan rencana kebutuhan sekolah, dan penyusunan anggaran.

2. Prosedur Perencanaan Anggaran Pendidikan Tingkat Kabupaten

Kepala Kandepdikbud/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten berfungsi menetapkan kebijaksanaan agar usulan-usulan mengenai kebutuhan biaya pendidikan memenuhi urutan prioritas yang realistik. Kebijaksanaan harus komprehensif yaitu memperhitungkan semua sumber anggaran yang ada seperti sumber dana rutin, pembangunan, bantuan Pemda, dan sumbangan yang sah lainnya. Kepala Kandepdikbud/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten juga berfungsi untuk memberikan persetujuan mengenai RAPBS dari semua sekolah yang berada di lingkungan kewenangannya. Dengan demikian, setiap kepala sekolah harus membuat dan menyampaikan RAPBS kepada kepala Kandepdikbud/kepala dinas Pendidikan kabupaten untuk mendapatkan persetujuan. Adapun bentuk kegiatan awal yang dilakukan pada tingkat kabupaten dimulai dengan pengumpulan data operasional pada semua satuan kerja, unit pelaksanaan teknis, sekolah-sekolah perkantoran, dan UPT lainnya seperti pendidikan masyarakat (dikmas). Prosedur pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Matin, 2014):

- a. Format isian yang sudah dibakukan diisi lengkap. Format isian untuk data yang bersifat rutin adalah format 3, 4, 5, dan Sasaran Usulan Anggaran Rutin (SUAR) yang sedang dikembangkan sekolah. Untuk anggaran pembangunan melalui format isian khusus yang dilakukan oleh unit perencanaan daerah yaitu sub bagian pengumpulan dan pengolahan data P2D di tingkat I dan urusan pendataan atau statistik di tingkat II dan tingkat kecamatan.
- b. Pengisian format didasarkan pada petunjuk teknis yang telah ditentukan agar data dan informasi yang diaring seragam.
- c. Melakukan kerja sama dengan kantor statistik setempat untuk memperoleh data yang akurat baik yang riil maupun data hasil proyeksi.
- d. Mengirim format pendataan yang sudah diisi ke kabupaten untuk bahan masukan usulan kebutuhan perencanaan dan penyusunan laporan wilayah.

Data dan informasi yang diterima oleh pihak kabupaten kemudian dikelompokkan menurut kategori tertentu. Misalnya, data guru dikelompokkan menurut jenis sekolah, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain. Kegiatan pokok pada tingkat pendidikan kabupaten ditekankan pada analisis data dan informasi tersebut secara tajam dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: menganalisis data sesuai dengan kategori yang ada, merumuskan dan mengembangkan indikator dan kriteria keberhasilan pendidikan, mengidentifikasi dan memverifikasi masalah, menganalisis dan mendiagnosis masalah menjajaki alternatif pemecah masalah yang sedang dihadapi, menentukan prioritas alternatif pemecahan setiap masalah, merumuskan sasaran kebutuhan nyata sesuai dengan potensi dan pengembangan daerah masing-masing, menyusun laporan tahunan lengkap, menyusun sasaran kebutuhan *riil* untuk tahun depan, menyesuaikan sasaran kebutuhan *riil* dengan kebutuhan lintas sektoral, menggariskan kebutuhan anggaran dengan pedoman kepada data tahun lalu dan perkiraan kenaikan inflasi untuk bahan pertimbangan dalam pembahasan di tingkat wilayah (Matin, 2014).

3. Prosedur Perencanaan Anggaran Pendidikan Tingkat Provinsi

Pada tahap persiapan rencana, diawali dengan mengadakan Rakerda tingkat 1 yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan Januari sampai bulan Maret. Merupakan permulaan dari penyusunan rencana dan anggaran tahun yang akan datang (T_0+1) yang pada hakekatnya merupakan kegiatan mengidentifikasi permasalahan pendidikan dan kebudayaan yang dihadapi setiap unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi serta merumuskan alternatif pemecahannya. Identifikasi permasalahan dilihat berdasarkan pelaksanaan tugas pada tahun yang sedang berjalan (T_0) sedangkan upaya-upaya pemecahannya dituangkan ke dalam usulan yang akan dikerjakan pada tahun yang akan datang (T_0+1). Bagian inilah yang kemudian digabung dengan berbagai hasil analisis yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun berikutnya, dijadikan rencana dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan sasaran yang akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan kepala Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang diusulkan (Matin, 2014).

Tahap selanjutnya merupakan pelaksanaan konsultasi regional yang diikuti oleh beberapa provinsi yang tergabung dalam satu region dengan tujuan untuk mencoba

melihat permasalahan-permasalahan kebersamaan dan mengusulkan pemecahannya secara terpadu. Penetapan region biasanya berdasarkan kedekatan lokasi (Matin, 2014).

Pada tingkat Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi, semua masukan baik laporan tahunan maupun usulan program dari seluruh kantor Depdikbud/Dinas Pendidikan Kabupaten Kota diolah dan dianalisis untuk bahan penyusunan laporan tahunan dan usulan program kantor wilayah/dinas pendidikan provinsi. Langkah-langkah kegiatannya meliputi (Matin, 2014):

- a. Mengolah pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran dari seluruh kantor Depdikbud/Dinas Pendidikan Kabupaten tahun yang akan datang.
- b. Mengolah usulan program Kandepdikbud/Dinas Pendidikan Kabupaten untuk dijadikan bahan masukan penyusunan usulan Kantor wilayah Depdikbud/Dinas Pendidikan Provinsi ke pusat dan sebagai bahan Rakerda tingkat I dan perencanaan sektoral.
- c. Melaksanakan Rakerda tingkat I. Hasil Rakerda dijadikan bahan masukan usulan program Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi tahun berikutnya.
- d. Menyesuaikan kebutuhan sasaran dan anggaran yang akan diusulkan oleh Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi.
- e. Menyusun usulan perencanaan rutin Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi dalam bentuk UKOR induk /UKOR terurai termasuk SPP/DPP.
- f. Menyusun usulan perencanaan pembangunan Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi dalam bentuk Usulan Proyek Lanjutan atau Usulan Proyek Baru.

Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran rutin dan pembangunan tersebut dikoordinasikan langsung oleh kepala Kantor wilayah kementerian Pendidikan dan kebudayaan/dinas pendidikan provinsi setempat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan rutin dan pembangunan Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi perlu disusun dalam bentuk UKOR induk/UKOR terurai termasuk SPP/DPP. Selain itu, juga perlu disusun usulan proyek lanjutan atau proyek baru. Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran rutin serta pembangunan ini harus dikendalikan oleh kepala Kantor Wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Selain itu, penting juga untuk melibatkan stakeholder terkait dalam proses perencanaan dan pembangunan ini, seperti sekolah-sekolah di wilayah tersebut, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan semua pihak terpenuhi dalam perencanaan dan pembangunan yang dilakukan. Selain itu, perlu juga adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana dan pembangunan tersebut. Monitoring dan evaluasi ini akan membantu dalam mengidentifikasi kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pelaksanaan. Dengan demikian, perbaikan dan penyesuaian dapat dilakukan agar tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, melalui monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan pengawasan terhadap penggunaan dana dan sumber daya yang telah dialokasikan untuk pembangunan tersebut, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program. Kekurangan dari proses pelaksanaan adalah

kemungkinan terjadi kesalahan dan kekurangan dalam identifikasi masalah atau kebutuhan yang sebenarnya. Hal ini bisa mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan dan alokasi sumber daya, sehingga tujuan dan target yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kelebihan dari monitoring dan evaluasi adalah dapat memberikan informasi yang akurat tentang kemajuan program pembangunan. Dengan adanya pengawasan terhadap penggunaan dana dan sumber daya, dapat diidentifikasi adanya penyelewengan atau ketidaksesuaian antara target yang telah ditetapkan dengan realitas yang ada. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dapat memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan program pembangunan yang sedang berjalan. Dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari program tersebut, langkah-langkah pengembangan yang lebih efektif dan efisien dapat diambil di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Arifin, A. (2003). *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang Undang SISDIKNAS*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Arwildayanto, Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Padjajaran: Widya Padjajaran.
- Ferdi, W. P. (2015). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>
- Haryani, D. (2023). Penerapan Finger Print Dalam Meningkatkan Disiplin. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 14(5), 14–26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7968965>
- Henukh, A. (2019). *Perencanaan Penganggaran Pendidikan Berbasis Manajemen Biaya Terpadu Di SD Negeri Lotelutun Kecamatan Rote Barat Daya Provinsi NTT*. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/download/242/201>
- Martin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Masditou. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu. *Jurnal ANSIRU PAI*, 1(2), 119–145. <https://doi.org/10.30821/ansiru.v1i2.1518.g1245>
- Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media Grup.
- Sofyan, Y., Marsanto, & Barlian, U. C. (2021). Analisis Pembiayaan Pendidikan (Suatu Kajian Praktis Dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan Di Sekolah Menengah Umum). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(1), 221–239. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i1.791>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaimi, M. (2021). *Pengelolaan Anggaran dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah di SMK Negeri 1 Mesjid Raya Aceh Besar*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Wandra, D., & Hadiyanto. (2021). Perencanaan Pembiayaan Pendidikan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2898–2904. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>

Zahrudin, Arifin, Z., & Suhandi, A. (2019). Implementasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(1), 46–56. <http://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs>